

**Pengarusutamaan Islam: Studi Atas Upaya Jamaah Jam'iyatul Islamiyah  
Menangkal Isu Penyesatan dan Memperoleh Penerimaan Publik di Palembang  
Oleh: Herwansyah  
[herwansyah\\_uin@radenfatah.co.id](mailto:herwansyah_uin@radenfatah.co.id)**

### **Abstract**

In its development, Jam'iyatul Islamiyah was full of controversy. Despite its further development, the movement is often considered as having teachings that are not in accordance with Islamic views. Deviance of this movement can be seen from documents published by the West Sumatra High Prosecutor's Office, West Sumatra MUI and Jambi MUI. There are three reasons why Jam'iyatul Islamiyah can survive. First, the movement chose to cooperate with the Indonesian Religious Council (MUI) by adhering to recommendations so that its teachings were revised. Second, the movement is inclusive, and finally the movement seeks to approach the elite in its various activities is characterized by the seminars it holds.

**Keywords:** jam'iyatul Islamiyah, deviance, religious movement

### **Abstrak**

Dalam perkembangannya, Jam'iyatul Islamiyah penuh dengan kontroversi. Meskipun berkembang pesat, gerakan ini sering dianggap memiliki ajaran yang tidak sesuai dengan pandangan Islam. Deviasi gerakan ini dapat dilihat dari dokumen yang diterbitkan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, MUI Sumbar dan MUI Jambi. Ada tiga alasan mengapa Jam'iyatul Islamiyah bisa bertahan. Pertama, gerakan tersebut memilih untuk bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia dengan mengikuti rekomendasi sehingga ajarannya direvisi. Kedua, gerakan itu inklusif, dan akhirnya gerakan itu berusaha mendekati elit dalam berbagai kegiatannya melalui seminar-seminar yang diselenggarakannya.

**Kata kunci:** jam'iyatul Islamiyah, penyimpangan, gerakan keagamaan

### **A. Pendahuluan**

Jam'iyatul Islamiyah sendiri sebenarnya telah tumbuh sejak tahun 1971 tepatnya hari Jum'at 12 Maret 1971 di Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi atas prakarsa Karim Djamak beserta Mayor Minha Rafat, Ketua Sekber Golkar Kabupaten Kerinci mendirikan Jam'iyatul Islamiyah Keluarga Besar Sekber Golkar. Dalam perkembangannya, Jam'iyatul Islamiyah penuh dengan kontroversi. Selain kemajuan yang dicapainya, gerakan ini acap kali dianggap telah mengembangkan ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, hingga berujung pada penyesatan. Penyesatan atas gerakan ini dapat dilihat dari dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, MUI Sumatera Barat dan MUI Jambi.

Meskipun terdapat kontroversi, gerakan ini mampu berkembang dengan cukup pesat. Dari Jambi, gerakan ini terus berkembang pesat hingga Sumatera Utara, Pekanbaru, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jogjakarta, DKI Jakarta,

Kalimantan , Kerinci, Batam, Kepulauan Riau , Sulawesi Selatan, NTB dan daerah lainnya termasuk sampai ke negara tetangga Malaysia dan Singapura. Perkembangan Jam'iyatul Islamiyah tidak hanya pada penyebaran gerakannya saja, namun gerakan ini mampu menarik minat dan merangkul tokoh-tokoh Islam dari kalangan akademisi, dan para intelektual lainnya di Indonesia untuk masuk sebagai anggota dan didudukkan sebagai pengurusnya.

## B. Pembahasan

Mengapa Jam'iyatul Islamiyah mampu berkembang di tengah isu kesesatan? Dalam penelitian ini mengungkapkan kapabilitas aktor dan media-media yang digunakan oleh aktor-aktor Jam'iyatul Islamiyah dalam mengembangkan pergerakan mereka telah mampu bertahan di tengah tuduhan sesat serta mampu berkembang.

### 1. Kooperatif Terhadap Majelis Ulama Indonesia

Organisasi Jam'iyatul Islamiyah bersikap kooperatif dengan datang memenuhi panggilan MUI Pusat untuk dimintai keterangan tentang paham mereka. Mereka datang dengan diwakili oleh DPP Jam'iyatul Islamiyah Jakarta. Menurut Kustini (2009) awalnya memang tidak mengakui adanya kekeliruan atau kesesatan seperti yang dituduhkan oleh masyarakat luas, namun setelah ditunjukkan beberapa penyimpangan yang ada di dalam buku pedoman Jam'iyatul Islamiyah yang diterbitkan oleh DPP Jam'iyatul Islamiyah Jakarta. Tidak terjadi perdebatan yang berarti antara MUI Pusat dengan Jam'iyatul Islamiyah. Bahkan mereka mau mengakui adanya kekeliruan dalam pemahaman yang dianutnya. Menariknya, mereka bahkan meminta kepada MUI Pusat untuk terus menerus melakukan pembinaan.

Usaha lain yang dilakukan Jam'iyatul Islamiyah adalah ketika pada tanggal 3 Juni 1994, perwakilan gerakan ini menemui Prof. K.H. Ibrahim Hosen, M.L.M selaku ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat untuk memintanya menjadi pembina Jam'iyatul Islamiyah. KH. Ibrahim Hosen merekomendasikan agar catatan Jam'iyatul Islamiyah mengenai Rukun Sembahyang yang ada dalam buku pedoman Jam'iyatul Islamiyah yang disusun oleh Darussamin Datuk Pangka Sinaro tidak dipergunakan lagi oleh Jam'iyatul Islamiyah. Prof. K.H. Ibrahim Hosen M.LM memerintahkan kepada Dewan Pimpinan Pusat Jam'iyatul Islamiyah (DPP Jam'iyatul Islamiyah) di Jakarta, untuk membuat instruksi ke seluruh jajaran Jam'iyatul Islamiyah di seluruh Indonesia agar tulisan tersebut tidak dipakai dan ditinggalkan.

Setelah penyesatan yang dilakukan oleh MUI Provinsi Sumatera Barat, Jam'iyatul Islamiyah meresponnya dengan meminta MUI Provinsi Sumatera Barat mengoreksi terhadap penyusunan Draft Buku Pedoman Jam'iyatul Islamiyah tanggal 9 April 2008 perihal Catatan koreksian Draft Buku Pedoman Jam'iyatul Islamiyah.

Majelis Ulama Indonesia bahkan mengeluarkan fatwa terbaru, untuk mengoreksi fatwa sebelumnya mengenai Jam'iyatul Islamiyah. MUI mengeluarkan Surat Keputusan berikut ini:

Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: 124/ MUI-SB/IV/2008 tanggal 9 April 2008 diantaranya :

1. Jam'iyatul Islamiyah yang dikembangkan oleh Bpk. Darus-Samin Datuk Pangka Sinaro (Alm), tidak ada hubungannya dengan Jam'iyatul Islamiyah

yang didirikan oleh Buya KH. Abdul Karim Djamak maupun yang kemudian dilanjutkan oleh Dr. H. Aswin Rose.

2. Melanjutkan prioritas pembenahan secara bertahap yang diawali dari Departemen Dakwah DPP Jam'iyatul Islamiyah sampai dengan tingkat paling bawah yakni menempatkan para ahli berlatar belakang agama untuk bertugas sebagai pendakwah.

3. Menghilangkan kebiasaan, atribut-atribut, gambar-gambar dan foto-foto yang dapat dan selalu menimbulkan fitnah di tengah-tengah masyarakat.

4. Mempertegas garis kebijakan organisasi menurut ketentuan dan tatacara berorganisasi sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku serta menyesuaikan dengan derap langkah reformasi.

5. Melegalformalkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) tentang :

- a. Nama, Waktu Pendirian dan Kedudukan Organisasi Jam'iyatul Islamiyah
- b. Kedaulatan Organisasi Jam'iyatul Islamiyah
- c. Sifat dan Fungsi Organisasi
- d. Azas dan Landasan Organisasi Jam'iyatul Islamiyah
- e. Tujuan dan Usaha Organisasi Jam'iyatul Islamiyah
- f. Atribut Organisasi Jam'iyatul Islamiyah
- g. Keanggotaan Organisasi Jam'iyatul Islamiyah
- h. Struktur dan Susunan Kepengurusan Organisasi Jam'iyatul Islamiyah
- i. Permusyawaratan Organisasi Jam'iyatul Islamiyah
- j. Pengambilan Keputusan Organisasi Jam'iyatul Islamiyah
- k. Keuangan dan Kekayaan Organisasi Jam'iyatul Islamiyah
- l. Perubahan, Penambahan dan Penyesuaian Organisasi Jam'iyatul Islamiyah
- m. Aturan Pengalihan Organisasi Jam'iyatul Islamiyah

6. Mendaftarkan Organisasi Jam'iyatul Islamiyah pada Direktorat Jendral KESBANGPOL (untuk tingkat pusat) dan Dinas KESBANGLINMAS (untuk tingkat daerah).

7. Meningkatkan kerjasama dan konsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mulai dari tingkat pusat sampai daerah, khususnya dengan MUI Pusat.

Rekomendasi yang diberikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) antara lain:

a. Dalam rangka menghadapi tantangan dari berbagai pihak, Jam'iyatul Islamiyah hendaknya terus melakukan pembenahan kedalam maupun keluar. Pembenahan kedalam dilakukan antara lain dengan terus meningkatkan pengetahuan dan praktek keagamaan bagi para pengikutnya guna menepis dugaan bahwa Jam'iyatul Islamiyah kurang memiliki sumber daya manusia yang diakui kedalaman pengetahuan keagamaannya. Pembenahan keluar antara lain dengan cara terus mengembangkan sikap inklusif, membuka diri terhadap kelompok organisasi Islam lainnya. Hal ini bisa dilakukan misalnya dengan mengundang berbagai tokoh organisasi Islam dalam berbagai event yang diadakan Jam'iyatul Islamiyah di Pusat dan Daerah.

b. Sebagai organisasi yang sedang dan terus berkembang, Jam'iyatul Islamiyah belum menampilkan ciri khas atau karakteristik dalam mengembangkan organisasi atau ajarannya. Kegiatan yang dilakukan seperti pengajian atau dakwah, kegiatan sosial, atau pendirian masjid dan musholla adalah kegiatan yang juga dilakukan kelompok Islam lainnya. Oleh karena itu pembinaan ke dalam hendaknya juga diarahkan untuk menentukan ciri atau karakteristik Jam'iyatul Islamiyah dengan

tetap berpegang pada ajaran-ajaran pokok Islam sebagaimana diungkapkan dalam Buku Pedoman.

c. Ditjen Bimas Islam Departemen Agama bekerja sama dengan MUI membuat agenda pertemuan berkala yang menghadirkan tokoh-tokoh organisasi keagamaan Islam. Agenda yang bisa dilakukan dalam pertemuan tersebut antara lain: silaturahmi, sosialisasi berbagai kebijakan pemerintah tentang kehidupan keagamaan, maupun sosialisasi berbagai program yang telah disusun oleh organisasi-organisasi keagamaan. Pertemuan seperti ini akan meningkatkan komunikasi serta meminimalisasi kecurigaan antar kelompok organisasi keagamaan Islam. Disamping itu dapat disusun suatu kegiatan sosial keagamaan yang melibatkan berbagai kelompok atau organisasi keagamaan dengan difasilitasi oleh Departemen Agama.

d. Majelis Ulama Indonesia akan terus melakukan pembinaan terhadap kelompok-kelompok keagamaan lain khususnya kelompok keagamaan yang diduga menyebarkan ajaran berbeda dengan umat Islam lainnya. Model pembinaan dan pendekatan yang dilakukan terhadap Jam'iyatul Islamiyah hendaknya juga dapat dilakukan terhadap kelompok atau organisasi Islam lainnya.

Bentuk kooperatif Jam'iyatul Islamiyah terhadap MUI tidak hanya pada persoalan ajaran semata, melainkan juga melalui pendekatan personal terhadap tokoh-tokoh MUI Pusat. Seperti telah disebutkan sebelumnya Prof. KH. Ibrahim Hossen, mantan ketua Majelis Fatwa MUI Pusat selama 20 tahun (1980-2000), pernah didaulat sebagai pembina kehormatan Jam'iyatul Islamiyah pada tahun 1994. Begitu juga dengan ketua MUI, KH Ma'ruf Amin, beliau pernah diundang dalam peresmian Masjid Baitul Ikhlas Islamiyah di Pekan Baru Riau pada tanggal 5 Januari 2015. Masjid itu sendiri merupakan masjid yang dibangun gerakan ini dengan menghabiskan total anggaran sebesar 11 Milliar Rupiah. KH. Ma'ruf Amin beserta Dr. Aswin Rose dan Gubernur Riau secara simbolik meresmikan masjid itu. Pada kesempatan itu pula, KH. Ma'ruf Amin yang saat itu menjabat sebagai ketua MUI Pusat bahwa Jam'iyatul Islamiyah yang dulu pernah dikritisi lembaganya sebagai pengikut aliran sesat kini perlu dikaji ulang. Menurut KH. Maaruf Amin, dengan banyaknya cendekiawan dan tokoh keagamaan yang berasal dari Jam'iyatul Islamiyah saat ini dirasa bisa mengawal lembaga tersebut dari penyesatan Aqidah. K.H Ma'ruf menjelaskan, jika perbedaan antara ormas dan gerakan Islam hanya sebatas furuk saja, maka sebenarnya hal itu tidak perlu dibesar-besarkan. Perbedaan yang tidak diperbolehkan adalah hal-hal strategis yang menyangkut aqidah. Jika apa yang dilakukan Jam'iyatul Islamiyah saat ini tidak menyelisihii umat Islam secara prinsip, hal itu menurut K.H Ma'ruf diperbolehkan. Hal-hal khilafiyah sangat beragam dan diamalkan oleh berbagai organisasi dan kelompok dakwah. Namun, hal tersebut tidak merusak kepada aqidah yang sifatnya mutlak harus sama.

Sumber ajaran Jam'iyatul Islamiyah telah termaktub dalam Buku Pedoman Jam'iyatul Islamiyah yang disusun dan diterbitkan Dewan Pimpinan Pusat Jam'iyatul Islamiyah pada bulan Juni 2008. Sebagaimana dijelaskan dalam Bab I Pendahuluan, Buku Pedoman tersebut dimaksudkan antara lain untuk menepis berbagai fitnah dan hujatan yang ada di masyarakat yang kemudian dijadikan dasar untuk menggolongkan Jam'iyatul Islamiyah sebagai kelompok sesat. Melalui Buku Pedoman tersebut, diharapkan segala fitnah dan hujatan yang tidak sesuai dengan Buku Pedoman dianggap sebagai hal yang tidak benar (Buku Pedoman Jam'iyatul Islamiyah, 2008: 1-2). Secara singkat isi buku terdiri atas 7 Bab yaitu secara berturut-turut: Pendahuluan, Kitab Tauhid, Kitab Thaharah, Kitab Ibadah, Kitab Tathawwu

(Shalat Sunnat), Kitab Jenazah, dan Kitab Do'a. Bagian Pendahuluan diawali dengan uraian singkat tentang tujuan penerbitan Buku Pedoman, antara lain disebutkan:

Pedoman ini juga dimaksudkan untuk menepis berbagai fitnah dan hujatan yang ada di masyarakat yang kemudian dijadikan dasar untuk menggolongkan Jam'iyatul Islamiyah sebagai kelompok sesat. Dengan demikian harapan kami, dengan terbitnya Buku Pedoman ini maka segala fitnah dan hujatan yang tidak sesuai dengan Buku Pedoman ini adalah tidak benar dan dengan demikian Organisasi Jam'iyatul Islamiyah dituntut tidak bertanggung jawab.

(Buku Pedoman Jam'iyatul Islamiyah, 2006 : 1-2).

Jika dibaca secara seksama keseluruhan Buku Pedoman tersebut, sesungguhnya tidak ada sesuatu yang baru, tidak ada bentuk-bentuk penafsiran dari berbagai permasalahan yang diungkapkan. Isi buku lebih merupakan deskripsi tata cara beribadat dan tuntunan bacaan-bacaan dalam melakukan ibadat tersebut. Secara umum isi buku tidaklah berbedadengan isi buku-buku tentang pedoman beribadat yang bisa diperoleh di berbagai toko atau kios buku. Hal ini diungkapkan antara lain oleh Ketua Komisi Pengkajian dan Pengembangan MUI Pusat:

Isi Buku Pedoman tersebut tidak ada sesuatu yang khusus. Buku tersebut seperti buku fiqih, sesuai dengan standar mazhab yang berkembang di Indonesia. Satu ciri yang membedakan buku tersebut dengan buku fiqih lainnya adalah di bagian depan yaitu Kata Pengantar yang didalamnya memuat 6 (enam) butir perintah Ketua Jam'iyatul Islamiyah yang intinya perintah untuk menjalankan ajaran Islam sesuai dengan syariat Islam yang berlaku di Indonesia (Wawancara dengan Ketua dan Anggota Komisi Pengkajian dan Pengembangan MUI Pusat, tanggal 8 September Prof. Utang Ranuwidjaja dan Amin Djamaluddin).

Perubahan yang signifikan dalam organisasi Jam'iyatul Islamiyah yang dilakukan secara mendasar adalah penyusunan Buku Pedoman Jam'iyatul Islamiyah yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Jam'iyatul Islamiyah. Sebagaimana hasil kajian sebelumnya bahwa salah satu faktor yang menimbulkan kesalahpahaman masyarakat terhadap ajaran Jam'iyatul Islamiyah adalah karena tidak ada pedoman atau buku yang menjelaskan ajaran Jam'iyatul Islamiyah. Hasil penelitian tersebut antara lain merekomendasikan agar Jam'iyatul Islamiyah menyusun buku pedoman sebagai counter terhadap kesalahpahaman yang ada di masyarakat (Kustini, 2006). Untuk menyusun Buku Pedoman tersebut, Jam'iyatul Islamiyah telah berkonsultasi dengan Prof. DR. H. Azhar Arsyad, MA Rektor UIN Alauddin Makassar dan Prof. Dr. H. Muhammadiyah Amin, MA Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo. Kedua tokoh tersebut merupakan penasehat Departemen Dakwah DPP Jam'iyatul Islamiyah. Belajar dari pengalaman pahit kegagalan peresmian masjid Baitul Izza Baiti Jamak Islamiyah di Padang tahun 2006 bahwa MUI dianggap memiliki peran cukup signifikan dalam kasus tersebut (Kustini dan Sri Sulastri, 2006) Memorandum Jam'iyatul Islamiyah & Pengagalan Peresmian Penggunaan Masjid Baitul Izza Baiti Jamak Islamiyah di Padang), maka para pengurus Jam'iyatul Islamiyah mencoba mendekati diri ke MUI dengan permohonan dapat dibina jika memang ajaran mereka menyimpang dari ajaran Islam pada umumnya. Dengan pertimbangan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga yang mewadahi komponen umat Islam Indonesia, DPP Jam'iyatul Islamiyah berkonsultasi, meminta bimbingan, saran dan petunjuk kepada Komisi Pengkajian dan Pengembangan.

Dalam bagian Pengantar Buku Pedoman tersebut, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Jam'iyatul Islamiyah memerintahkan kepada seluruh pemuka dan jamaahnya untuk melakukan: (a). agar meluruskan hal-hal yang selama ini menyimpang dari akidah dan syariat Islam; (b). mensosialisasikan paradigma baru kepada seluruh Jam'iyatul Islamiyah; (c). Jamaah Jam'iyatul Islamiyah hendaknya bersifat terbuka dan membaaur dengan masyarakat Islam lainnya dan tidak bersikap eksklusif; (d). mengambil langkah-langkah untuk menghilangkan tradisi yang salah seperti tidak mengkultuskan individu seseorang karena semata-mata yang disembah hanyalah Allah swt; (e). menghilangkan semua atribut-atribut yang ada di setiap masjid Jam'iyatul Islamiyah seperti adanya gambar ka'bah dan foto-foto lainnya serta mengembalikan fungsi masjid sebagaimana mestinya; (f). seluruh Dewan Pimpinan Daerah Jam'iyatul Islamiyah sampai ke tingkat paling bawah hendaklah lebih meningkatkan kerjasama dan konsultasi dengan MUI di daerahnya masing-masing.

Di Palembang, bahkan DPP Jam'iyatul Islamiyah sering mengunjungi kota ini pada tahun 2010 tepatnya tanggal 6 Februari 2010 diadakan sebuah seminar yang bertajuk "Memperkuat Ukhuwah Islamiyah Menuju Terciptanya Izzul Islam Wal Muslimin". Acara itu sendiri dilaksanakan di di Graha Bina Praja (Auditorium Pemda Prov Sumatera Selatan) yang dihadiri oleh para elit pemerintah dan ulama, di antaranya adalah Gubernur Sumatera Selatan – Ir. H. Alex Noerdin, SH dan Sekretaris Umum MUI Pusat – Drs. H. Ichwan Syam.

Selain itu, menariknya, Jam'iyatul Islamiyah sering mengundang anggota-anggota MUI untuk melakukan ceramah di Masjid Baitul Atiq. Mereka memberikan ceramah biasanya pada acara pengajian juga meminta dari mereka untuk mengisi khotbah Jumat. Narasumber mengungkapkan sebagai berikut : "Ado galak ceramah jugo wong-wong MUI di sini, Ndak ketuonyo, cuma Iyo wong anggota MUI kota Palembang. Ceramah macem-macem, kadang pas acaro pengajian, kadang ceramah jumat jugo". Ketika ditanya apa anggota MUI memberikan pengarahan terhadap organisasi Jamiatul Islamiyah, Ia mengaku bahwa tidak ada arahan hanya ceramah jumat biasa. Ia mengatakan "biaso bae ceramah jumat, cak mano ceramah jumat masalah takwa tulah, ujung-ujungnyo takwa".

Selain itu mereka secara gamblang mengakui bahwa dalam berIslam tidak boleh bertentangan dengan pemerintah dan juga kelompok ulama yang sah diakui oleh negara dalam hal ini MUI. Narasumber bernama Mukhtadin mengungkapkan bahwa "kito tetep ngikuti ijma' ulama untuk melakukan taswiyah al-manhaj (cara mengatasi perbedaan) dan tansiq al-harakah (harus mengikuti apa yang dikatakan oleh MUI dan Pemerintah)"

Seperti dijelaskan oleh Martin Van Bruinessen, bahwa dalam konteks Indonesia MUI memiliki "supreme authority" dalam mendefinisikan ke-Islaman. Mau tak mau, suka tak suka, jika memang suatu gerakan keagamaan dapat diterima oleh publik, khususnya diterima oleh komunitas Muslim mainstream, harus mengikuti pola yang definitif dari Majelis Ulama Indonesia. Jikalau ada penafsiran tambahan terkait dengan ke-Islaman yang berbeda dengan pemahaman MUI, maka gerakan keagamaan perlu segera melakukan evaluasi mengenai sesuai atau tidaknya ajaran yang dimilikinya. Dengan kata lain MUI adalah proxy dalam menentukan bentuk ke-Islaman di Indonesia. Oleh sebab itu, berdasarkan data-data yang telah disampaikan nampak jelas bahwasanya Jam'iyatul Islamiyah telah berhasil menjadi bagian dari ke-Islaman di Indonesia melalui penyesuaian-penyesuaian yang dilakukannya sesuai dengan arahan dan petunjuk Majelis Ulama Indonesia (MUI). Meskipun, MUI Pusat yang berkedudukan di Jakarta tidak melihat adanya kesesatan pada organisasi ini,

namun MUI Sumatera Barat baru-baru ini melalui Keputusan Rapat Koordinasi Bidang Kerukunan dan Ukhuwwah Majelis Ulama Indonesia/MUI dan MUI Kab/Kota se-Sumatera Barat, tertanggal 21 Juli 2018 menyatakan bahwa gerakan Jamiatul Islamiyah yang membawa ajaran Karim Jama' dianggap sesat dan menyesatkan. Tidak terima dengan keputusan itu, Jam'iyatul Islamiyah dan meminta MUI untuk mengklarifikasi pernyataannya. Mereka komplain atas tuduhan itu, dari kesalahan dalam mengeja organisasi Jamiyatul Islamiyah yang seharusnya adalah Jam'iyatul Islamiyah dan juga Karim Jama' yang seharusnya KH. Abdul Karim Djama'. Protes gerakan ini atas keputusan itu dinyatakan dalam surat tertulis yang menurut penulis sangatlah ilmiah, seperti halnya surat pembelaan dalam masalah hukum. Di samping itu, Jam'iyatul Islamiyah menyebut beberapa tokoh dalam MUI baik di tingkat pusat maupun di daerah menjadi bagian dari gerakan ini. Poin penting yang diminta klarifikasi adalah seputar tidak dijelaskannya lebih rinci mengenai kesesatan gerakan ini. Namun begitu, Jam'iyatul Islamiyah tidak segan-segan mengajak dialog MUI beserta ormas Islam lainnya untuk memberi masukan, bimbingan maupun saran bukan sebaliknya memvonis.

## 2. Inklusifitas Gerakan

Salah satu ciri khas dari gerakan sempalan adalah memiliki keanggotaan yang eksklusif mulai dari proses rekrutmen yang hanya terbatas pada relasi dan orang-orang yang benar-benar dapat dipercaya, hingga kegiatan yang dilaksanakannya hanya terbatas pada anggotanya saja. Keanggotaan ditentukan juga dari kartu keanggotaan dan ada juga yang menerapkan mekanisme baiat.

Namun, Jam'iyatul Islamiyah tidak seperti gerakan sempalan lainnya, gerakan ini bersikap terbuka atau dengan kata lain Jami'yyatul Islamiyah adalah gerakan yang inklusif. Inklusifitas dari pada gerakan ini terletak pada keterbukaan kegiatannya yang boleh diikuti oleh siapapun juga. Seluruh aktivitas gerakan ini dipusatkan di Masjid Baitul Atiq Palembang. Masyarakat sekitar bahkan banyak yang tidak mengetahui bahwasanya masjid itu adalah masjid milik gerakan Jam'iyatul Islamiyah. Hal itu karena masjid ini tidak memiliki merek gerakan yang terpampang jelas di depan masjid, meski terdapat ruangan yang terdapat banner sekretariat Jam'iyatul Islamiyah.

Begitu juga dengan kegiatan umum seperti halnya pengajian, shalat berjamaah, dan ibadah pada saat hari raya tidak dibatasi hanya untuk para anggotanya saja.

Keanggotaan dalam gerakan ini kemungkinan besar sangatlah cair. Mereka tidak memiliki kartu keanggotaan, maupun memiliki mekanisme baiat. Ketika ditanya mengenai apa yang menjadi dasar dari keanggotaan gerakan ini, maka jawabannya adalah aktivitas dalam Jamaah. Semakin aktif para anggota maka semakin terbentuk sendiri ikatan di antara mereka, dan identitas di antara mereka pada akhirnya terbentuk dengan sendirinya. Dalam sosiologi proses ini dapat dikatakan sebagai bentuk Solidaritas Mekanik dalam istilah Durkhemian.

Pengajian seharusnya menjadi media dari gerakan ini dalam meraih atensi masyarakat yang lebih luas, oleh sebab itu maka pengajian di setting untuk siapa saja dapat hadir pada setiap kegiatannya. Jam'iyatul Islamiyah dalam melaksanakan pengajiannya tentu saja dihadiri oleh berbagai macam golongan dan juga masyarakat umum. Meski begitu, tidak banyak memang masyarakat luar yang hadir untuk mengikuti pengajian Jam'iyatul Islamiyah ini disebabkan oleh minimnya informasi yang disebarkan pihak jamaah kepada masyarakat, namun setiap masyarakat yang hadir sudah pasti diakomodir disediakan tempat sama dengan jamaah lainnya selama pengajian berlangsung.

Solidaritas terbentuk antar jamaah meski memiliki strata sosial yang berbeda, seperti misalnya jamaah yang menduduki jabatan penting di Jam'iyatul Islamiyah apabila mereka sedang mengobrol bersama jamaah yang lainnya maka obrolan yang dibahas pun obrolan yang ringan menyesuaikan kedudukan jamaah, tidak ada lagi perbedaan, tidak lagi memandang dia pejabat penting atau bukan. Tidak adanya kartu anggota dalam setiap jamaah menandakan bahwa diantara mereka tidak ada yang dibeda-bedakan semuanya melebur menjadi satu, baik itu jamaah dari kalangan akademik seperti professor ataupun doktor, ataupun masyarakat awam yang sama sekali tidak mengenyam dunia pendidikan. Tidak ada ciri khas yang menonjol dari masing-masing jamaah baik itu dari kalangan pejabat ataupun dari pegawai biasa semuanya hanya bersatu dalam satu wadah yang berlatar organisasi Jam'iyatul Islamiyah. Meski begitu, Berdasarkan wawancara dan pengamatan, baik di lokasi penelitian, maupun di tempat para jamaah Jam'iyatul Islamiyah berdomisili, tergambar adanya persaingan antara sesama anggota jamaah Jam'iyatul Islamiyah, namun masih dalam konotasi positif, misalnya masing-masing anggota jamaah berusaha untuk hadir dalam setiap pertemuan yang diadakan oleh Pihak Dewan Pimpinan Daerah Jam'iyatul Islamiyah dalam rangka acara pengajian, ataupun merayakan hari besar Islam ini terlihat dari para jamaah yang rela hadir walaupun dari daerah yang jauh dari lokasi pengajian, ada yang datang dari ujung kota seperti Plaju, Kertapati, dan juga luar kota, mereka memiliki semangat yang sama untuk berlomba-lomba menghadiri pengajian sudah tertanam dalam hati para jamaah dalam rangka niat untuk memperdalam ilmu agama. Pengajian menjadi suatu sarana dalam memberikan motivasi yang sangat kuat terhadap anggotanya dalam menunjukkan keanggotaannya. Melalui media inilah terbentuk proses manajemen konflik yang mumpuni dalam memperkuat identitas mereka sebagai seorang anggota yang loyal dan setia tidak peduli dari latar belakang apa mereka berasal. Di kalangan jamaah Jam'iyatul Islamiyah, kompetisi juga terjadi pada saat penentuan siapa di antara jamaah yang mendapat kesempatan untuk menghadiri undangan pengajian akbar di tingkat nasional, karena hanya beberapa jamaah yang terpilih untuk dapat hadir di acara undangan tingkat nasional. Namun, kompetisi itu tidak menjadi konflik yang muncul ke permukaan yang disebabkan oleh landasan keikutsertaan dalam berjamaah yang disandarkan pada kesadaran sendiri akan rasa keimanan kepada Allah, di mana setiap peristiwa yang terjadi dan dialami manusia di dunia ini berasal dari Allah, termasuk peluang atau kesempatan menunaikan ibadah haji. Hal ini sejalan dengan ungkapan seorang jamaah dan diikuti oleh jamaah yang lain sebagai berikut: "aai oleh katek duit bae, kalo ado duit lah dari dulu pengen naek haji, mano pulok harus ngantri kalo ado duit, kalo daerah dusun aku nunggu 17 tahunan baru pacak berangkat."

Yo pengen jugo, iri ado nyingok kawan kami duluan pegi haji, tapi untuk apo terus-terusan iri dengan wong lain yang memang punyo rejeki, iri hati itu tidak bagus, pacak merusak ibadah jugo lamo-lamo".

Kemudian, salah seorang jamaah lainnya mengatakan: "untuk apo iri hati dengan kawan yang duluan pacak naek haji, itu kan sudah nasib dan rizkinya, lebih baik mendoakan semoga dio selamat pegi dan selamat balek, dan mudah-mudahan kito pacak nyusul kapan-kapan".

Ketiga petikan wawancara ini melambangkan bahwa, konflik laten antar sesama jamaah Jam'iyatul Islamiyah pada dasarnya tetap ada, akan tetapi dapat diredam sendiri oleh masing-masing yang berkonflik dengan adanya semangat kebersamaan dan keberagaman yang terangkul dalam wadah organisasi Jam'iyatul Islamiyah. Selanjutnya, di antara sesama jamaah Jam'iyatul Islamiyah

maupun pengurus organisasi Jam'iyatul Islamiyah tidak terdapat prasangka sosial. Hal ini disebabkan karena antar mereka telah terjadi jalinan yang sangat erat dan dekat, sehingga mereka dapat saling mengenal antara pribadi yang satu dengan yang lainnya. Akibatnya prasangka sosial tidak terpenuhi, dan berikutnya tidak terjadi diskriminasi antar individu dalam kelompok.

Inklusifitas gerakan juga ditunjukkan dengan bentuk interaksi mereka terhadap masyarakat sekitar. Antara jamaah Jam'iyatul Islamiyah dengan warga sekitarnya, selama ini terjadi kerjasama dalam bentuk kegiatan besar Islam seperti Hari Raya Idul Fitri, dan Hari Raya Idul Adha mereka bersama-sama mengumpulkan dana demi suksesnya perayaan hari besar tersebut, namun untuk selanjutnya hampir tidak pernah terjadi kerjasama secara langsung. Dalam hal Qurban ataupun zakat mereka menerima siapa saja bagi masyarakat yang akan berpartisipasi dalam hal ibadah tersebut tanpa memandang siapa dan dari mana asalnya. Ketika Qurban mereka membaur dengan masyarakat dalam hal pengumpulan dana, penyembelihan untuk kemudian dibagikan kepada yang berhak menerima hewan qurban tersebut dengan tidak memandang apakah ia anggota atau tidak. Selain itu, untuk zakat mereka menerima dan mengelola dana dari siapa saja para muzakki (pembayar zakat) untuk kemudian diserahkan kepada para mustahik (penerima zakat). Dalam struktur organisasinya mereka memiliki divisi-divisi yang kemanfaatannya diperuntukkan bagi masyarakat luas, seperti divisi pendidikan yang mempunyai program yang khusus mempersiapkan lembaga-lembaga Pendidikan Formal dari tingkat Taman Pendidikan Islam dan Al Qur'an sampai ke jenjang lebih tinggi, Divisi Pembangunan bekerja sama membantu Umat Islam sekaligus Pemerintah Dalam Pembangunan terutama untuk pembangunan Sarana Ibadah, MCK dan pendidikan, Divisi Sosial melakukan kegiatan sosial diantaranya Santunan Fakir Miskin, Penyaluran Zakat, Hewan Qurban dan kegiatan sosial lainnya. Keterbukaan gerakan ini dalam berbagai macam kegiatannya memang tidak serta merta mampu menghindarkan mereka dari anggapan kesesatan. Namun upaya itu, setidaknya mampu meminimalisir kebencian dan ketidaksukaan masyarakat Islam karena stereotype sesat yang telah terlanjur melekat dalam gerakan ini, karena upaya itu berarti menunjukkan bahwa keberadaan gerakan ini mampu memberikan kemanfaatan yang lebih luas bagi umat Islam secara umum.

### 3. Pendekatan terhadap Elit dan Negara

Indonesia mengalami perubahan politik yang signifikan dari masa Orde Baru hingga masa Reformasi. Pada masa Orde Baru ketika Negara sangatlah kuat maka pemerintah memiliki otoritas yang tak terbantahkan, sebaliknya pada masa Reformasi, publik mendapatkan otoritas yang sangat kuat karena bisa sangat berpengaruh terhadap dikeluarkannya suatu kebijakan pemerintah.. Oleh sebab itu, perkembangan suatu gerakan sangat ditentukan dari cara mereka beradaptasi terhadap para pemilik otoritas.

Jam'iyatul Islamiyah membuktikan bahwa gerakan ini mampu beradaptasi dengan baik terhadap perubahan politik. Pada masa Orde Baru, Jam'iyatul Islamiyah dapat berkembang dengan mendapatkan dukungan dari Golongan Karya (Golkar) partai pemerintah pada saat itu. Gerakan ini didirikan atas prakarsa Buya KH. Abdul Karim Djamak, Mayor Min Harafat dan Sekber Golkar di sungai Penuh Kerinci Jambi dan mampu berkembang ke berbagai daerah di dalam naungan partai Golkar. Dalam perkembangannya juga, Karim Djamak mengenal berbagai elit-elit pemerintah juga karena ketergabungannya dalam Golkar. Memang tidak serta merta suatu Gerakan

dapat terhindar dari cap sesat hanya karena ia dilindungi pemerintah, namun setidaknya suatu gerakan dapat bertahan dan berkembang. Sebagai contoh, LDII yang sejak awal berdirinya berada di bawah naungan Golkar, masih mana mampu bertahan bahkan berkembang hingga saat ini, meskipun cap sesat masih melekat dalam gerakan ini. Selain itu, secara legal formal Jam'iyatul Islamiyah adalah organisasi resmi yang secara sah diakui negara. Gerakan ini terdaftar di Departemen Dalam Negeri Nomor 220/110 tanggal 19 Mei 1987. Juga di tingkat daerah, Jam'iyatul Islamiyah mendaftarkan dirinya ke Kesbangpol setempat agar diakui secara sah sebagai organisasi massa.

Pada masa Reformasi, Jam'iyatul Islamiyah dapat menyesuaikan dirinya untuk mendapatkan penerimaan publik. Pendekatan yang dilakukannya pun berbeda. Gerakan ini sering memanfaatkan seminar-seminar ilmiah dengan bekerjasama dengan instansi baik Pemerintah maupun Swasta, dari pemerintah daerah, pusat, hingga perguruan tinggi. Strategi ini dapat dikatakan cukup berhasil. Gerakan ini dapat menjaring intelektual muslim terkemuka sebut saja, Prof. Dr. Imam Suprayogo mantan rektor UIN Malang, Prof. Dr. Azhar Arsyad mantan rektor UIN Makassar, Prof. Dr. Gumilar Rusliwa Sumantri mantan rektor Universitas Indonesia, dan masih banyak lagi. Imam Suprayogo sendiri mengakui bahwa perkenalannya dengan Dr. Aswin Rose disebabkan karena pertemuan mereka saat menghadiri undangan seminar dari UIN Makassar yang pada saat itu dipimpin oleh Prof. Dr. Azhar Arsyad yang mana antara Azhar dan Imam adalah sahabat dekat.

Strategi itu setidaknya menimbulkan tiga keuntungan bagi Jam'iyatul Islamiyah. Pertama, setidaknya ketergabungan para elit itu mampu mengurangi stigmatisasi sesat yang melekat. Ilustrasinya "Banyak ahli-ahli Islam baik ahli Fiqih, Tafsir, maupun ahli Tasawuf yang keserjanaannya diakui di Indonesia bergabung dengan gerakan ini, bagaimana bisa dikatakan gerakan ini sesat". Selain Prof. Azhar Arsyad dan Prof. Imam Suprayogo, para ahli keislaman yang berkecimpung dalam gerakan ini antara lain Prof. Dr. H. Mohammad Amin, MA, ahli hadits, Prof. Abd. Rahim Yusuf ketua MUI Sulawesi Selatan, Prof. Dr. HM Ghalib M ahli tafsir dari UIN Makassar dan lain-lain. Kedua, kehadiran tokoh-tokoh intelektual itu dalam gerakan ini dijadikannya sebagai "merek" dagang untuk meraih atensi masyarakat luas yang sebagian besar dari kalangan terdidik dan kelas menengah ke atas. Berbagai seminar yang dilakukannya, kehadiran tokoh-tokoh intelektual itu selalu menjadi tagline berita mengenai gerakan ini. Seperti halnya contoh kasus di Palembang, dalam website Dr. Aswin Rose diberitakan bahwa kuliah umum yang terselenggara berkat kerjasama dengan STIE APRIN Palembang di Hotel Grand Zuri 30 Juni 2018 dihadiri oleh para guru besar dan akademisi dari seluruh Indonesia. Ketiga, dengan media itu, maka gerakan ini mampu merekrut kelompok masyarakat kelas menengah ke atas, terutama banyak kalangan akademisi, akibatnya bisa jadi dengan ketergabungan mereka maka berakibat pada luasnya jaringan dan memperoleh pendanaan yang cukup signifikan.

Jam'iyatul Islamiyah sebagai gerakan membangun basis melalui dakwah, diskusi, dan seminar dalam berbagai kesempatan dan berbagai tempat. Pola ini dilakukan sejak Jam'iyatul Islamiyah datang ke Palembang pada tahun 2005. Jam'iyatul Islamiyah Palembang Pernah melaksanakan Seminar di hotel Jayakarta Daira Palembang pada tahun 2013 bekerja sama dengan kampus IAIN Raden Fatah Palembang dalam rangka silaturahmi memperkenalkan gerakan dakwah Jam'iyatul Islamiyah serta memperluas jaringan antara jamaah Jam'iyatul Islamiyah dengan kalangan para akademisi kampus UIN Raden Fatah yang didalamnya terdapat para

mahasiswa dan dosen-dosen yang turut serta hadir dalam rangkaian kegiatan tersebut.

Sementara dalam bidang pemerintahan sepengetahuan penulis dalam menanyakan kepada para subjek dalam hal ini para jamaah Jam'iyatul Islamiyah belum ada yang menyatakan kerja sama dalam bentuk tindakan hanya berupa pemikiran-pemikiran saja, misalnya apabila pemerintah melakukan kesalahan Jam'iyatul Islamiyah dapat mengingatkan bila kebijakan pemerintah tak sesuai dengan nilai-nilai religius. Seperti yang dikatakan oleh bapak Idham "Ini memang jalan panjang. "Kalau Indonesia diserahkan ke tangan-tangan generasi yang profesional religius. Niscaya Indonesia akan berada di barisan depan dalam peradaban dunia. Menjadi panutan terciptanya masyarakat yang sejahtera, demokratis, berkeadilan, dan bermartabat. Dengan demikian pemerintah memiliki tempat untuk bertanya dan berdiskusi, sehingga apa yang dibuat pemerintah memiliki sandaran moral."

Jam'iyatul Islamiyah juga menjalin kerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia dalam hal menangkal upaya adanya paham radikalisme baik antar jamaah Jam'iyatul Islamiyah sendiri ataupun juga masyarakat. Paham radikalisme bisa muncul dari mana saja, bisa dari internet, bisa dari ceramah agama yang melenceng, hasutan-hasutan dan sebagainya. Sedangkan yang populer untuk saat ini paham radikal banyak bertebaran di media sosial, karena banyak para akun yang mengaku ustad, padahal bukan ustad, akun yang mengaku Kyai, padahal bukan Kyai.

Menurut bapak Idkham ada banyak cara untuk menanggulangi adanya paham radikalisme, salah satunya yang sesuai dengan jaman sekarang yaitu dengan melalui media internet, karena di internet informasi bisa diperoleh dengan mudah, segala informasi ada disitu, sasarannya juga tidak jauh-jauh yaitu para anak muda yang pemahaman agamanya belum terlalu mendalam apalagi anak muda jaman sekarang para anak muda jaman sekarang sangat sulit untuk jauh dari gadget.

Menurutnya, langkah untuk menanggulangi penyebaran paham radikal melalui internet itu tidak bisa dilakukan dengan cara-cara kekerasan, melainkan harus dengan langkah persuasif yang juga menggunakan media internet.] Penyebaran paham radikal, juga bisa dilakukan lewat garis keturunan atau hubungan keluarga dengan menanamkan rasa kebencian dan permusuhan kepada apa saja yang mereka definisikan sebagai musuh. Karena itu, pentingnya pemberdayaan seluruh komponen masyarakat, antara lain ulama, organisasi kemasyarakatan, dan kepemudaan untuk menangkal dan menanggulangi penyebaran paham radikal. Jam'iyatul Islamiyah sendiri akan terus membantu pemerintah hingga ke tingkat anak cabang dan untuk membantu pemerintah kota atau kelurahan guna mendeteksi gejala radikalisme. Selain itu, mereka juga akan melakukan dakwah yang menyejukan dan mempersatu kekokohan NKRI.

### C. Kesimpulan

Setidaknya terdapat tiga sebab mengapa Jam'iyatul Islamiyah dapat bertahan. Pertama, gerakan ini memilih untuk bersikap kooperatif kepada Majelis Ulama Indonesia dengan mentaati rekomendasi agar dilakukan revisi atas ajaran-ajarannya. Kedua, gerakannya bersifat inklusif, dan terakhir gerakan berupaya melakukan pendekatan terhadap para elit dalam berbagai kegiatannya terurama dengan seminar-seminar yang diselenggarakannya. tulisan ini merekomendasikan agar penelitian kedepan dilakukan dengan studi perbandingan. Misalnya dilakukan perbandingan mengenai gerakan Jam'iyatul Islamiyah Sumatera Barat yang sampai sekarang masih belum lepas dari polemic, yang mana MUI setempat masih bertahan

untuk mensesatkan gerakan ini dengan Jam'iyatul Islamiyah Sulawesi Selatan, Jambi, dan Riau yang dianggap cukup sukses dalam mengembangkan gerakan terbukti dengan masuknya intelektual muslim terkemuka dari daerah itu ke dalam organisasi. Atau dapat juga melakukan perbandingan antara gerakan ini dengan gerakan lainnya yang masih mendapatkan label sesat seperti Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).

## DAFTAR PUSTAKA

Asad, Talal. *The Idea of an Anthropology of Islam*. Washington, DC: Center for Contemporary Arab Studies, Georgetown University. 1986

Bruinessen, Martin Van. "Gerakan sempalan di kalangan umat Islam Indonesia: latar belakang sosial-budaya" ("Sectarian movements in Indonesian Islam: Social and cultural background"), *Ulumul Qur'an* vol. III no. 1, 1992, 16-27

Clarke. Peter. 2006. *New Religions in Global Perspective*. London:Routledge. 2006

Garrett. W.R. "The Sociological Theology of H. Richard Niebuhr," in W. H. Swatos, Jr. (ed.), *Religious Sociology* (Westport, Conn.: Greenwood, 1987): 41-55

Giddens. Anthony. *The Constitution of Society*. University of California Press: 1986

Hidayah, Sita. *Religion In The Proper Sense of The Word: Discourse of Agama in Indonesia*. Tesis CRCS, Program Pascasarjana, UGM. 2008

Kustini dan Sri Sulastri. "Kasus Penggagalan Peresmian Masjid Baitul Izza Baiti Jamak Islamiyah di Kota Padang". Dalam *Kasus-Kasus Aliran/Faham Islam*. Balitbang Kemenag. 2006

Noor, Hasni. "Fenomena Aliran-Aliran Sempalan di Indonesia," *Jurnal Al Ulum*, Vol 42 No 4 Tahun 2009

Tarrow, Sidney. *Power in Movements*. Cambridge University Press:1994

Troeltsch, Ernst. *Ernst Troeltsch: Writings on Theology and Religion*. Edited and Translated by Robert Morgan and Michael Pye. Atlanta: John Knox Press.1977

Turner, Jonathan. "The Theory of Structuration." *American Journal of Sociology*, Volume 91, Issue 4 (Jan., 1986), 969-977